

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 dapat diselesaikan. Sebab sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban Lurah dalam menjalankan roda Pemerintahan Kalurahan selama 1 (Satu) tahun, Lurah harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan kepada Bupati yang disampaikan melalui Panewu. Selama Lurah menjabat telah melakukan berbagai kegiatan yang timbul sebagai bentuk dari penggunaan dan pengelolaan keuangan Kalurahan yang anggarannya didapatkan dari pemerintah baik pusat maupun daerah yang harus dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada masyarakat Kalurahan maupun secara kedinasan kepada atasannya.

Lurah dalam mengelola keuangan Kalurahan telah menggunakan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk berbagai bidang kegiatan yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, bidang pembangunan Kalurahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat. Lurah telah memberikan kemampuan terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kalurahan Beji dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh pemerintahan di atasnya secara sungguh-sungguh. Namun perlu disadari bahwa tiada hal yang sempurna selain Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga dengan Lurah yang meskipun telah berupaya sekuat pikiran dan tenaga namun masih ada saja kekurangan dan kesalahan. Maka, pembinaan dan bimbingan dari pihak-pihak terkaitpun masih sangat diharapkan untuk dapat memperbaiki kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Lurah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan dan pelaporannya.

Dengan ini Lurah menyampaikan pertanggungjawaban atas segala kegiatan penggunaan dan pengelolaan keuangan di Kalurahan Beji selama 1 tahun melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Lurah Beji tahun 2021. Kami menyadari laporan pertanggungjawaban yang kami sampaikan masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat menerima kritik dan saran sehingga kami dapat melakukan perbaikan di waktu mendatang. Harapan kami, dengan selesainya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 ini masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengambil manfaatnya.

Beji, 14 Februari 2022

Lurah Beji

**TTD**

Sri Idhayanti

# **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2021 KEPADA BUPATI GUNUNGKIDUL**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Tujuan Penyusunan Laporan**

Adapun tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan tahun 2021 adalah sebagai berikut.

1. Menyampaikan Pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan baik bidang pemerintahan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat selama tahun 2021.
2. Menjelaskan kepada Bupati dalam melaksanakan pemerintahan kalurahan tahun 2021 dengan bersih dan transparan.
3. Menjelaskan kepada Panewu, Bamuskal dan stek holder yang terkait dalam melaksanakan pemerintahan kalurahan tahun 2021 dengan bersih dan transparan.
4. Sebagai Laporan Akhir dari Lurah selama 1 tahun menjabat Lurah di tahun 2021.

### **B. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**

Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 sangat memberikan peluang bagi Pemerintah Kalurahan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Kalurahan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari paradigma tersebut juga mensyaratkan perlunya penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah lainnya. Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan yang diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya, baik kepada publik maupun kepada lembaga dimana dia bekerja. Dengan akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya, baik yang dilakukan oleh masyarakat, instansi kerjanya, kelompok pengguna

pelayanannya maupun profesinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan dan bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya.

Oleh karenanya, sebagai salah perwujudan akuntabilitas, sekaligus pelaksanaan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka pada akhir jabatannya Lurah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, termasuk kepada pemerintah yang lebih tinggi melalui Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintah Kalurahan (LKPPKalurahan). Secara yuridis formal, penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintah Kalurahan telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 huruf (b) Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Pemerintah Daerah mengharuskan pada pemerintah kalurahan agar melakukan pelaporan penggunaan dan pengelolaan keuangan kalurahan yang dilaksanakannya. Pelaporan tersebut selain berguna sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterimanya juga berfungsi sebagai bahan kontrol dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kalurahan. Evaluasi dilakukan terhadap kegiatan mulai dari perencanaan tahunan Kalurahan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) maupun perencanaan jangka menengah 6 (enam) tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) terhadap konsistensi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dan pelaporan atau pertanggungjawaban kegiatan melalui Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJ). Dari evaluasi yang dilakukan tersebut akan didapatkan data tentang keunggulan maupun kelemahan dari suatu program atau kegiatan, keberhasilan maupun kekurangan dari suatu pelaksanaan kegiatan. Data yang dihasilkan tersebut dapat digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan akan program kebijakan yang sudah dan akan dilakukan selanjutnya. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut diharapkan nantinya visi Kalurahan Beji dapat tercapai. Adapun visi Kalurahan Beji adalah sebagai berikut:

**“Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima Dalam Pemerintahan Yang Baik Menuju Masyarakat Desa Beji Yang Maju, Mandiri, Aman Dan Sejahtera”**

Kemudian untuk lebih menguatkan Visi, Lurah Beji mengangkat sebuah slogan yaitu :

## **Bersama Rakyat, Beji Kuat !!!**

Dengan slogan ini diharapkan semua elemen baik Pemerintah Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW) Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat Budaya dan seluruh Lapisan masyarakat, secara bersama – sama membangun Desa Beji. Sehingga Desa Beji akan menjadi Desa yang Kuat dari semua sisi baik Infrastruktur, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kuat dalam adat dan Budaya, Kuat dalam Kepemudaan, serta yang terdepan adalah kuat dalam ketaqwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun Misi Desa Beji adalah sebagai berikut.

### 1. Bidang Pemerintahan

- a) Meningkatkan SDM aparatur Desa,
- b) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik,
- c) Memberdayakan kelembagaan masyarakat,
- d) Memberdayakan LINMAS Desa,
- e) Sertifikasi Tanah dan,
- f) Meningkatkan ketertiban, keamanan serta pengendalian dan pengawasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

### 2. Bidang Pembangunan

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana umum
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian
- c) Meningkatkan sarana dan prasarana Transportasi
- d) Memberdayakan dan meningkatkan swadaya masyarakat
- e) Memanfaatkan sumberdaya alam dan pemanfaatannya
- f) Memelihara sarana dan prasarana keamanan
- g) Memelihara dan meningkatkan sarana peribadahan
- h) Memelihara sarana dan prasarana pendidikan
- i) Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan

### 3. Bidang Kemasyarakatan

- a) Membina kerukunan umat beragama
- b) Memelihara dan meningkatkan kemakmuran tempat ibadah

- c) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaan usaha kecil dan pembinaan masyarakat untuk sadar wisata dan menjadikan potensi wisata sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian
- d) Meningkatkan kecerdasan warga dan memberantas ketertinggalan
- e) Memberdayakan dan memelihara hidup gotong royong
- f) Memberdayakan lembaga kemasyarakatan Desa
- g) Memberdayakan dan pembinaan karang taruna
- h) Pembinaan terhadap pendidikan anak dan remaja
- i) Melestarikan budaya dan kesenian daerah
- j) Mengadakan pelatihan-pelatihan ketrampilan siap menghadapi dunia kerja
- k) Mengembangkan BUMDesa serta penguatan permodalan BUMDesa dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada dapat dioptimalisasikan sektor pertanian baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.
- l) Mengoptimalkan sektor pertanian, baik pada tahap produksi maupun tahap pengelolaan hasil
- m) Dari bidang Pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan tersebut terangkum misi Desa Beji, yaitu ;
- n) Mewujudkan masyarakat yang tertib, guyup rukun dalam kehidupan bermasyarakat, yang mengedepankan sinergitas prinsip-prinsip keagamaan, budaya dan adat istiadat yang ada, masyarakat yang berpengetahuan dan terampil yang mampu melaksanakan pembangunan di Desa Beji melalui pemberdayaan dan pelatihan – pelatihan.
- o) Menyediakan dan memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan serta berkeadilan.
- p) Menjalankan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik, Jujur dan Transparan.
- q) Mewujudkan Desa Beji Sebagai Desa Budaya Dengan Mengedepankan Nilai-nilai Kearifan Lokal Sebagai Daya Tarik Potensi Wisata.
- r) Pelaksanaan Pembangunan Desa Yang Berkesinambungan untuk mewujudkan Desa Beji sebagai Desa Wisata dan Destinasi Tujuan Wisata.
- s) Meningkatkan pelayanan Administrasi, pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan dan karang taruna.

- t) Mengembangkan BUMDesa serta penguatan modal BUMDesa dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada.
- u) Mengoptimalakan sektor pertanian dan industri rumah tangga baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

### **C. Strategi dan Kebijakan**

Strategi pembangunan desa merupakan upaya untuk merealisasikan program pembangunan desa. Adapun strategi tersebut dalam pencapaian pembangunan desa adalah tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal, yakni :

#### **1. Strategi internal**

Strategi internal dalam pelaksanaan program pembangunan desa meliputi:

- a) Mewujudkan Integritas Perangkat Desa melalui penyepakatan dan penandatanganan Pakta Integritas. Hal ini untuk menjadi sebuah landasan atau pondasi untuk membangun kapasitas Pemerintahan Desa dan ditujukan untuk:
- b) Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- c) Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas perangkat Desa agar lebih berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintah Desa dan warga masyarakat yang maju, mandiri, bertanggungjawab, dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila;
- d) Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui pendayagunaan potensi dan aset-aset desa yang selama ini belum dikelola secara maksimal, terutama untuk mengembangkan sektor pariwisata, menuju Beji sebagai Desa Wisata sekaligus Desa Budaya.
- e) Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera.
- f) Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan supradesa dan infradesa. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapanya, maka leading sectornya diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kecamatan, forum SKPD maupun

musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan di wilayah Desa maka kepala desa menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaannya seperti ADD dan Dana Desa, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggung jawab desa seperti jalan lingkungan desa beserta bangunan pelengkapannya.

- g) Meningkatkan kesadaran, rutinitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM Desa yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat agar masyarakat desa semakin diperhitungkan di hadapan para stake holder.

## 2. Strategi eksternal

Strategi eksternal dalam pencapaian program pembangunan desa antara lain ;

- a) Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJM Desa pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.
- b) Membangun kerjasama antardesa untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reorientasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- c) Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM Desa.
- d) Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM Desa melalui haering dan jaring aspirasi yang sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan. Apabila anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM Desa, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya.
- e) Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

- f) Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program selama 6 tahun ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

- a) Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
- b) Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
- c) Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
- d) Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

- a) Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD
- b) Musyawarah Pertanggungjawaban oleh setiap lembaga berdasarkan program dan pelaksanaannya
- c) Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM Desa, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.
- d) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa dalam setiap akhir tahun anggaran.

**BAB II**  
**PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**  
**KALURAHAN**

**A. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/Jumlah	
			2020	2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Peraturan Perundang-undangan	a. Peraturan Kalurahan	7	5
		b. Peraturan Bersama Lurah	0	0
		c. Peraturan Lurah	6	7
		d. Keputusan Lurah	29	45
2.	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk		
		1) Laki-laki	2.131	2.138
		2) Perempuan	2.137	2.156
		3) Jumlah Kepala Keluarga	1.231	1.514
		4) Jumlah Jiwa	4.268	4.294
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:		
		1) Tidak Sekolah/Belum Sekolah	1.638	1.657
		700	697	
		2) Tidak Tamat SD	468	461
		3) Tamat SD	683	683
		4) Tamat SMP	669	680
		5) Tamat SMA	14	14
		6) DI/DII	18	19
		7) DIII	76	81
8) S-1	2	2		
9) S-2	0	0		
10) S-3				

		<p>c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencahariaan:</p> <p>1) Petani/Buruh Tani</p> <p>2) Wiraswasta</p> <p>3) Buruh Harian Lepas</p> <p>4) Karyawan Swasta</p> <p>5) PNS</p> <p>6) Pensiunan</p> <p>7) Mengurus Rumah Tangga</p> <p>8) Perangkat Desa</p> <p>9) Tidak Bekerja</p> <p>10) Lainnya</p>	<p>827</p> <p>100</p> <p>157</p> <p>178</p> <p>20</p> <p>19</p> <p>32</p> <p>20</p> <p>60</p> <p>93</p>	<p>820</p> <p>99</p> <p>165</p> <p>183</p> <p>22</p> <p>18</p> <p>34</p> <p>21</p> <p>61</p> <p>91</p>
3.		<p>a. Status Tanah:</p> <p>1) Sertifikat Hak Milik</p> <p>2) Sertifikat Hak Guna Usaha</p> <p>3) Sertifikat Hak Pakai</p>	<p>2.706</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>2.706</p> <p>0</p> <p>0</p>
		<p>b. Luas Tanah:</p> <p>1) Bersertifikat</p> <p>2) Belum Bersertifikat</p> <p>3) Tanah Kas Kalurahan</p>	<p>2.706</p> <p>701</p> <p>406.127</p>	<p>2.706</p> <p>701</p> <p>406.127</p>
		<p>c. Peruntukan:</p> <p>1) Jalan (Ha)</p> <p>2) Tanah Ladang (Ha)</p> <p>3) Bangunan Umum (Ha)</p> <p>4) Perumahan (Ha)</p> <p>5) Ruang Fasilitas Umum (Ha)</p>	<p>15,1500</p> <p>411,2158</p> <p>1,1740</p> <p>188,1705</p> <p>60,8071</p>	<p>15,1500</p> <p>411,2158</p> <p>1,1740</p> <p>188,1705</p> <p>60,8071</p>
		<p>d. Tanah yang Belum Dikelola</p> <p>1) Hutan (Ha)</p> <p>2) Rawa-rawa (Ha)</p>	<p>25,0000</p> <p>0</p>	<p>25,0000</p> <p>0</p>
4.	Manajemen Pemerintahan	<p>a. Jumlah Aparat Pemerintah Kalurahan:</p>		

		1) PNS	0	0
		2) Non PNS	23	24
		b. Jumlah Anggota Bamuskal	9	7
		c. Musyawarah Kalurahan	4	2
		d. Musrenbang Kalurahan	1	1
		e. Musyawarah Bamuskal	12	12
5.	Ketentraman dan Ketertiban	a. Pembinaan Linmas		
		1) Jumlah Anggota	28	28
		2) Alat Pemadam Kebakaran	0	0
		3) Jumlah Hansip Terlatih	28	28
		b. Ketentraman dan Ketertiban		
		1) Jumlah Kejadian Kriminal	0	0
		2) Jumlah Bencana Alam	0	0
		3) Jumlah Operasi Penertiban	0	0
		4) Jumlah Pos Keamanan	14	14
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	0	0
6.	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:		
		1) RT/RW	Ada	Ada
		2) PKK	Ada	Ada
		3) Karang Taruna	Ada	Ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu	Ada	Ada
		5) LPM	Ada	Ada
		b. Lembaga Kemasyarakatan membantu Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat	Ada	Ada
		c. Lembaga Kemasyarakatan sebagai Wadah Partisipasi	Ada	Ada

		Masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah		
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikutsertakan dalam pelaksanaan program sektoral dan program Pemerintah Daerah	Ada	Ada
		e. Lembaga Adat	Ada	Ada
		f. Lembaga adat dibentuk dengan Peraturan Kalurahan terpisah dengan lembaga kemasyarakatan	Tidak Ada	Tidak Ada

## **B. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2021**

Adapun rencana program kerja bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Beji tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
2. Penghasilan tetap dan tunjangan kades dan perangkat desa.
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Tunjangan Desa.
5. Operasional Desa.
6. Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja.
7. Penyedia jasa jaminan barang milik desa.
8. Penyedia jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor.
9. Penyediaan peralatan rumah tangga.
10. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Desa.
11. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional.
12. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Dinas/operasional.
13. Operasional RT dan RW.
14. Operasional PKK.
15. Operasional LPMD.
16. Operasional Karang Taruna.

17. Pengadaan Seragam/Pakaian Dinas
18. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
19. Penyusunan Monografi Desa.
20. Penyusunan Profil Desa.
21. Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID).
22. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDDes.
23. Perubahan RKPDDes.
24. Penyusunan Pemanfaatan Tata Ruang Desa.
25. Penyelenggaraan Musyawarah Desa.
26. Penyelenggaraan Musrenbang Desa.
27. Penyusunan Raperdes tentang APBDesa.
28. Penyusunan Raperdes Perubahan APBDesa.
29. Penyusunan Lap Keu Bulanan/SPJ Semesteran.
30. Penyusunan Raperdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.
31. Inventarisasi Kekayaan/Aset Desa.
32. Penyusunan Rancangan Perdes Tentang Pungutan Desa.
33. Pengisian Perangkat Desa.
34. Peningkatan Pelayanan Satu Pintu.
35. Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan Perorangan.
36. Penyusunan Rancangan Perdes Tentang STOK.
37. Penyusunan LPPD.
38. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.
39. Penyusunan Rancangan Perdes Tentang Penyertaan Modal Desa.
40. Penyusunan Rancangan Perdes Tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
41. Penghargaan Purna Tugas Bagi Aparatur Pemerintah Desa.
42. Fasilitasi persertipikatan tanah.

### **C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2021**

Adapun Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.

2. Penghasilan tetap dan tunjangan kades dan perangkat desa.
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD, dan PPKD dll)
5. Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll).
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
8. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
9. Pengadaan peralatan kerja.
10. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa.
11. Penyusunan monografi desa.
12. Pendataan keluarga/rumah tangga miskin.
13. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler).
14. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler).
15. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll).
16. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll).
17. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa.
18. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan).
19. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat.
20. Pengembangan Sistem Informasi Desa.
21. Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran.
22. Pengisian perangkat desa.
23. Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa.
24. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
25. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
26. Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB



### BAB III

## PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

### A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/Ada/Tidak Ada - Ya/Tidak Ada	
			2020	2021
1	2	3	4	5
1	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Kalurahan (Km)	0	0,13
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	0	0
		c. Jalan Provinsi (Km)	0	0
		d. Jalan Negara (Km)	0	0
		e. Jembatan (Buah)	1	1
		f. Kantor Lurah (Ada/Tidak)	0	0
2	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan Pendidikan Umum		
		1) Kelompok Bermain (Jumlah)	0	0
		2) Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	0	0
		3) Sekolah Dasar (Jumlah)	0	0
		4) Sekolah Menengah (Jumlah)	0	0
		5) Akademi (Jumlah)	0	0
		6) Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	0	0
		b. Tempat Pendidikan Khusus		
		1) Pendidikan Pesantren (Jumlah)	0	0
		2) Madrasah (Jumlah)	0	0
		3) Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	0	0
		4) Balai Latihan Kerja (Jumlah)	0	0
		5) Kursus-Kursus (Jumlah)	0	0
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintahan (Jumlah)		

		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	0	0
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	0	0
		d. Rumah Sakit Mata (Jumlah)	0	0
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	0	0
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	0	0
		g. Rumah Bidan	0	0
		h. Puskesmas (Jumlah)	0	0
		i. Apotik (Jumlah)		
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga 1) Lapangan Umum (Jumlah) 2) Lapangan Khusus (Jumlah)	0 0	0 0
		b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1) Gelanggang Remaja (Jumlah) 2) Gedung Kesenian (Jumlah) 3) Gedung Teater (Jumlah) 4) Gedung Bioskop (Jumlah)	0 0 0 0	0 0 0 0
		c. Sarana Sosial 1) Panti Asuhan (Jumlah) 2) Panti Pijat Tunanetra (Jumlah) 3) Panti Wordo (Jumlah) 4) Panti Jompo (Jumlah)	0 0 0 0	0 0 0 0
		d. Sarana Komunikasi 1) Radio Komunitas (Jumlah) 2) Papan Pengumuman (Jumlah)	0 0	0 0
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Permukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)		
		b. Industri Besar (Jumlah)	0	0
		c. Industri Sedang (Jumlah)	0	0
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	0	0

	e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	0	1
	f. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	0	0
	g. Saluran Irigasi (Jumlah)	0	0

## **B. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun**

### **Anggaran 2021**

Adapun rencana program kerja bidang pelaksanaan pembangunan Kalurahan Beji tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

1. Insentif pendidik dan dukungan penyelenggaraan PAUD.
2. Pengadaan sarana prasarana kegiatan belajar mengajar.
3. Pengelolaan perpustakaan desa.
4. Pengembangan objek wisata yang dikelola desa.
5. Pembangunan jalan desa.
6. Pembangunan gorong-gorong.
7. Rehabilitasi/pemeliharaan gorong-gorong.
8. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan desa.
9. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan permukiman.
10. Pemeliharaan jalan desa.
11. Rehabilitasi saluran/drainase lapangan umum.
12. Rehabilitasi Gapura.
13. Rehabilitasi/Pemeliharaan Kios Desa.
14. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
15. Pengelolaan Wana Desa.
16. Pengembangan dan Pembinaan Posyandu.
17. Pengembangan Desa Siaga.
18. Pembangunan Lapangan Olahraga.
19. Rehabilitasi/Pemeliharaan Taman Desa.

## **C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun**

### **Anggaran 2021**

Adapun Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal.
2. Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa.
3. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
5. Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD.
6. Pemeliharaan Jalan Desa.
7. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan.
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan.
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll).
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan.
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa.
12. Pemberian stimulan jamban sehat.
13. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll).
14. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
15. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
16. Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata.
17. Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa.
18. Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa.
19. Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata.

**BAB III**  
**PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

**A. Gambaran Umum Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan**

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/Ada/Tidak Ada - Ya/Tidak Ada	
			2020	2021
1	2	3	4	5
1	Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Kalurahan: 1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Kalurahan	Tidak Ada	Tidak Ada
		2) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014	Tidak Ada	Tidak Ada
		3) Peraturan Menteri mengenai Kalurahan	Ada	Ada
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Kalurahan	Ada	Ada
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Kalurahan	Ada	Ada
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kalurahan 1) Sosialisasi Peraturan Kalurahan	Ada	Ada
		2) Sosialisasi Peraturan Lurah	Ada	Ada
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Lurah	Tidak Ada	Tidak Ada

2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	Tidak Ada	Tidak Ada
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah	Tidak Ada	Tidak Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil	Ya	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban	Ya	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Kalurahan	Ya	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama	Ada	Ada
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian	Ada	Ada
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat	Ada	Ada
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup	Ada	Ada
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal	Tidak Ada	Ada
		f. Sosialisasi mengenai ketenagakerjaan	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim	Ada	Ada
		b. Majelis Gereja	Ada	Ada
		c. Majelis Hindu	Ada	Ada
		d. Remaja Masjid	Ada	Ada
		e. Remaja Gereja	Ada	Ada
		f. Remaja Budha	Tidak Ada	Tidak Ada

		g. Remaja Hindu	Ada	Ada
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga	Tidak Ada	Tidak Ada
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri	Tidak Ada	Tidak Ada

## **B. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun**

### **Anggaran 2021**

Adapun rencana program kerja bidang pembinaan kemasyarakatan Kalurahan Beji tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan peringatan hari besar nasional.
2. Pembinaan satuan perlindungan masyarakat (Linmas).
3. Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
5. Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin.
6. Penanganan Anak dan Lansia Terlantar.
7. Optimalisasi peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.
8. Pelaksanaan Upacara Daerah.
9. Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah.

## **C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun**

### **Anggaran 2021**

Adapun Pelaksanaan Program Kerja Bidang pembinaan kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

1. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes.
2. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa.
3. Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana.
4. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
5. Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya.
6. Operasional Karang Taruna.
7. Operasional LPMD dan/atau LPMD
8. Operasional PKK

**BAB V**  
**PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**A. Gambaran Umum Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/Ada/Tidak Ada - Ya/Tidak Ada	
			2020	2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya	Ada	Ada
		b. Bidang Ekonomi	Ada	Ada
		c. Bidang Politik	Tidak Ada	Tidak Ada
		d. Bidang Lingkungan Hidup	Ada	Ada
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga	Ada	Ada
		b. Pemberdayaan Pemuda	Ada	Ada
		c. Pemberdayaan Olah Raga	Tidak Ada	Tidak Ada
		d. Pemberdayaan Karang Taruna	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan	Tidak Ada	Tidak Ada
		b. Bidang Kesehatan	Ada	Ada

## **B. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2021**

Adapun rencana program kerja bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan Beji tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dibidang perencanaan pembangunan.
2. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dibidang pengelolaan keuangan.
3. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dibidang manajemen pemerintahan.
4. Peningkatan kapasitas anggota BPD.
5. Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong.
6. Pembinaan kader pemberdayaan masyarakat.
7. Pemberian stimulan pembangunan padukuhan.
8. Pelaksanaan Kursus/Pelatihan Keterampilan masyarakat.
9. Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa.
10. Pembinaan Keluarga Berencana.
11. Pemberian Bantuan Stimulan Jamban Sehat.
12. Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia.
13. Pembinaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi.
14. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Pengarusutamaan Gender.

## **C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2021**

Adapun Pelaksanaan Program Kerja Bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

1. Pelatihan dan pengembangan pupuk organik.
2. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.
3. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa.
4. Peningkatan Kapasitas BPD.
5. Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja.
6. Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha.
7. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
8. Pengelolaan pasar desa

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**

**A. Rincian APB Kalurahan Tahun 2021**

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, secara umum APB Kalurahan Beji Tahun Anggaran 2021 adalah terdiri dari :

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	13.3880.000,00
b. Transfer	Rp.	2.198.502.900,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	4.890.000,00
d. Jumlah Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.217.272.900,00
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp.	993.777.659,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	968.721.697,55
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	71.045.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	30.185.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp.	193.743.500,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.257.472.856,55
Surplus/(Defisit)	Rp.	40.199.956,55
=====		
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	40.199.956,55
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	40.199.956,55
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	0,00
SIILPA tahun berjalan	Rp.	0,00

Rincian APB Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

## B. Rincian Realisasi APB Kalurahan Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Nomor Tahun 2021 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	10.000.000,00
b. Transfer	Rp.	2.185.956.290,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	2.120.791,00
d. Jumlah Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.198.077.081,00
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp.	963.095.773,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	894.132.697,55
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	59.168.750,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	29.718.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp.	173.373.500,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.119.488.720,55
Surplus/(Defisit)	Rp.	78.588.360,45
	=====	
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	40.199.956,55
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	40.199.956,55
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	0,00
SIILPA tahun berjalan	Rp.	118.788.317,00

Rincian Realisasi APB Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

II.

## **BAB VII**

### **KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH**

#### **A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**

##### **1. Keberhasilan Yang Dicapai**

Keberhasilan yang telah dicapai pada bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan telah tercapai 97% hal ini didasarkan pada penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Adapun kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada bidang ini adalah Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan).

##### **2. Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan bidang ini adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersifat fluktuatif dalam artian pendapatan dapat berubah bergantung dengan situasi dan kondisi.

2. Peraturan Kalurahan ataupun Tahun 2021 masih berfokus pada Peraturan dalam Perencanaan dan atau keuangan.

##### **3. Upaya Yang Ditempuh**

Dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang menggunakan pendanaan bersumber pada PAD perlu adanya koordinasi secara intensif dengan semua pihak yang berkepentingan guna memaksimalkan PAD. Selain itu, potensi sosial masyarakat perlu digali lebih lanjut untuk menentukan arah dan langkah kebijakan yang menimbulkan terbentuknya Peraturan Kalurahan atau Peraturan Lurah.

## **B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

### **1. Keberhasilan Yang Dicapai**

Keberhasilan yang telah dicapai pada bidang pelaksanaan pembangunan telah tercapai 92% hal ini didasarkan pada penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Adapun kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada bidang ini adalah Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa.

### **2. Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan bidang ini adalah sebagai berikut.

1. Sulitnya mendapatkan material urug di semester kedua dikarenakan banyaknya pembangunan di sekitar.
2. Kurangnya koordinasi yang melibatkan Pemangku Wilayah, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Anggaran.

### **3. Upaya Yang Ditempuh**

Upaya yang ditempuh untuk meminimalisir atau mencegah kegiatan yang tidak dapat terlaksana di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan pembangunan sebaiknya dilakukan di awal semester 2 atau di akhir semester 1 tahun berjalan.
2. Pelaksana Anggaran selalu berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait baik TPK atau Pemangku Kewilayahan.

## **C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

### **1. Keberhasilan Yang Dicapai**

Keberhasilan yang telah dicapai pada bidang pelaksanaan pembangunan telah tercapai 82% hal ini didasarkan pada penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Meskipun presentase ketercapaian kurang dari 90% akan tetapi semua kegiatan dapat terlaksana. Sisa presentase dari keberhasilan ini merupakan sisa anggaran yang bersumber pada kegiatan Jaga Warga. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini bersumber pada Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan Provinsi sehingga sisa anggaran dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur No 100 Tahun 2020.

## **2. Permasalahan**

Pelaksanaan kegiatan di bidang ini tidak memiliki permasalahan yang berarti.

## **3. Upaya Yang Ditempuh**

Penataan dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan matriks atau kerangka acuan kerja kegiatan.

## **D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Keberhasilan Yang Dicapai**

Kerhasilan yang telah dicapai pada bidang pelaksanaan pembangunan telah tercapai 98% hal ini didasarkan pada penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

## **2. Permasalahan**

Pelaksanaan kegiatan di bidang ini tidak memiliki permasalahan yang berarti.

## **3. Upaya Yang Ditempuh**

Penataan dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan matriks atau kerangka acuan kerja kegiatan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan di Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul.

Semoga segala bentuk harapan dan strategi arah Pembangunan Kalurahan Beji ini dapat menjadikan Pemerataan dalam membangun manusia dan membangun sarana prasarana aktifitas sosial, ekonomi sehingga diharapkan terwujudnya pembangunan yang adil dan merata menuju kesejahteraan bagi seluruh komponen masyarakat Kalurahan Beji.

Laporan penyelenggaraan pemerintah kalurahan ini masih belum sempurna, diharapkan masukan dari berbagai kalangan dalam rangka perbaikan untuk tahun berikutnya.

Beji, 14 Februari 2022

